ARTIKEL

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Oleh:

MUKHLIS ARSYI MUTO'I

NPM 14.1.02.01.0258

Dibimbing oleh:

1. Faisol, S.Pd., M.M.
2. Sigit Puji Winarko, S.E.,S.Pd.,M.Ak.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mukhlis Arsyi Muto'i
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir	: Kediri, 31 Juli 1996
NPM	: 14.1.02.01.0258
Alamat Surel (E-mail)	: khlis1234@gmail.com
Judul Artikel	: Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 76, Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 20 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Faisol, S.Pd., M.M. NIDN. 0712046903	Sigit Puji Winarko, S.E.,S.Pd.,M.Ak. NIDN. 0716057101	Mukhlis Arsyi Muto'i 14.1.02.01.0258

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Mukhlis Arsyi Muto'i
14.1.02.01.0258
Email : khlis1234@gmail.com
Faisol
faisol_hambali@yahoo.go.id
Sigit Puji Winarko
Sigitpuji@unpkediri.ac.id
PROGRAM STUDI AKUNTANSI - FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Abstrak: Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis Kinerja pendapatan daerah jika dilihat dari Varians Pendapatan, Analisis Rasio Keuangan, dan Efektifitas PAD daerah Kabupaten Kediri (2) Untuk menganalisis Kinerja belanja daerah jika dilihat dari Varians Belanja, Analisis Keserasian Belanja,dan Efisiensi Belanja daerah Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Objek dalam penelitian ini adalah data-data keuangan seperti APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi. Dan sumber data pada penelitian ini berupa data sekunder. Kesimpulan ini menggunakan 8 analisis (1)Analisis varians Pemerintah Kabupaten Kediri, secara umum sudah dapat dikatakan baik karena realisasi pendapatan melampaui target anggaran (2)Analisis Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Kediri dapat dikatakan kurang, sehingga pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum bisa menyelenggarakan desentralisasi (3)rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri dikatakan masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat (4)Efektifitas PAD daerah Kabupaten Kediri dapat dikatakan sangat efektif sekali karena pemerintah daerah dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah sesuai target yang diharapkan (5) Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Kediri dikatakan rendah karena tingkat ketergantung terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi dan menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah (6)Analisis Varians Belanja daerah Kabupaten Kediri secara umum sudah dapat dikatakan baik karena anggaran pendapatan lebih besar daripada realisasi pendapatan (7) Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Kediri secara umum dapat dikatakan kurang serasi karena kabupaten lebih mengutamakan belanja operasi dibandingkan belanja modal (8) Efisiensi Belanja daerah Kabupaten Kediri dapat dikatakan Efisien.

Kata Kunci: *Kinerja APBD, Kinerja Pendapatan Daerah, Kinerja Belanja Daerah*

I. LATAR BELAKANG

Penelitian ini dilatar belakangi karena Pemerintah daerah harus berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Namun, bantuan yang berasal dari pemerintah pusat masih merupakan sumber penerimaan yang terbesar, sehingga menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pusat dan masih kurangnya

daerah dalam menunjukkan kemandirian suatu daerah. Maka perlu untuk mengukur sejauh
mana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya agar dapat mengetahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Mardiasmo (2009:61), "anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial".

Menurut Nurlan Darise (2008 :51), "kinerja keuangan adalah Realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual".

Menurut Abdul Halim (2007:99), "pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah".

Menurut Nurlan Darise (2008:50), "belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda".

Data Realisasi APBD Kabupaten Kediri tahun 2013 – 2017 di ambil dari situs resmi pemerintah (juta rupiah) sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Kabupaten Kediri

Uraian	Pendapatan	Belanja	Surplus/ (Defisit)	PAD
2013	1.790.936	1.595.444	195.492	203.212
2014	2.062.590	1.826.897	235.692	291.948
2015	2.317.501	2.274.442	43.059	314.168
2016	2.395.721	2.617.072	(221.350)	339.113
2017	2.451.786	2.844.521	(392.734)	291.321

Sumber: *www.djpk.depkeu.go.id*

Jika dilihat seperti tabel di atas, fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 kabupaten kediri telah mengalami surplus yang naik, namun pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan, hingga pada tahun 2016 dan 2017 sampai mengalami defisit. Hal ini disebabkan oleh belanja yang dari tahun-ketahunnya selalu mengalami kenaikan, sedangkan kemampuan daerah dalam menganggarkan pendapatan masih kurang, diantaranya disebabkan oleh perolehan PAD yang masih cenderung berfluktuatif yang mana itu menunjukkan bahwa kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri masih belum optimal. Dari argumentasi hasil penelitian terdahulu

dan fakta yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten Kediri selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 – 2017.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pendapatan Kabupaten Kediri jika dilihat dari varians pendapatan?
2. Bagaimana kinerja pendapatan Kabupaten Kediri jika dilihat dari analisis derajat desentralisasi?
3. Bagaimana kinerja pendapatan Kabupaten Kedirijika dilihat dari analisis rasio ketergantungan keuangan?
4. Bagaimana kinerja pendapatan Kabupaten Kediri jika dilihat dari analisis efektifitas PAD?
5. Bagaimana kinerja pendapatan Kabupaten Kediri jika dilihat dari analisisrasio kemandirian keuangan daerah?
6. Bagaimana kinerja belanja Kabupaten Kediri jika dilihat dari varians belanja daerah?
7. Bagaimana kinerja belanja Kabupaten Kediri jika dilihat dari analisis keserasian belanja daerah?
8. Bagaimana kinerja belanja Kabupaten Kediri jika dilihat dari analisis efisiensi belanja daerah?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penlitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja pendapatan Kabupaten Kediri menggunakan varians pendapatan.
2. Untuk menganalisis kinerja pendapatan Kabupaten Kediri menggunakan analisis derajat desentralisasi.
3. Untuk menganalisis kinerja pendapatan Kabupaten Kediri menggunakan analisis rasio ketergantungan keuangan.
4. Untuk menganalisis kinerja pendapatan Kabupaten Kediri menggunakan analisis efektifitas PAD.
5. Untuk menganalisis kinerja pendapatan Kabupaten Kediri menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah.
6. Untuk menganalisis kinerja belanja Kabupaten Kediri menggunakan varians belanja daerah.
7. Untuk menganalisis kinerja belanja Kabupaten Kediri menggunakan analisis keserasian belanja daerah.
8. Untuk menganalisis kinerja belanja Kabupaten Kediri menggunakan analisis efisiensi belanja daerah.

II. METODE

A. Teknik dan Pendekatan Penelitian

1. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sugiyono (2015 :29), "penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:10), "pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan".

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang menyusun RAPBD dan melaksanakan APBD, dimana ada kemungkinan besar / potensi ketidak optimalan dalam penganggaran APBD Kabupaten Kediri.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah data - data keuangan seperti total pendapatan dan total belanja daerah pada laporan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Kediri.

C. Sumber Data dan Teknik Analisis Data

1. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian adalah dokumen - dokumen resmi serta sumber - sumber lainnya berupa runtut waktu yaitu laporan Realisasi APBD dan APBD Kabupaten Kediri pada tahun 2013 – 2017 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi.

2. Teknik Analisis Data

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah. Menurut Mahmudi (2010 : 136) Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan

melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Berikut ini rumus Menurut Mahmudi (2010 : 136):

Varians pendapatan = realisasi pendapatan – anggaran pendapatan

b. Derajat Desentralisasi. Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini rumus menurut Mahmudi (2010:142):

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pend. Daerah}} \times 100\%$$

Kategori derajat desantralisasi menurut Bisma dan Susanto (2010) sebagai berikut:

No	Kriteria	Prosentase
1	Sangat kurang	0% – 10%
2	Kurang	> 10,01% – 20%
3	Cukup	> 20,01% – 30%
4	Sedang	> 30,01% – 40%
5	Baik	> 40,01% – 50%
6	Sangat baik	50,01 – 100%

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi. Berikut ini rumus menurut Mahmudi (2010:142):

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Tranfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma dan Susanto (2010) nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebagai berikut:

No	Kriteria	Prosentase
1	Sangat rendah	0% – 10%
2	Rendah	> 10,01% – 20%
3	Cukup	> 20,01% – 30%
4	Sedang	> 30,01% – 40%
5	Tinggi	> 40,01% – 50%
6	Sangat tinggi	50,01 – 100%

4. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang

ditargetkan (Mahmudi, 2010:143). Rumus:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Efektifitas PAD menurut Mahmudi (2010: 143) dikategorikan sebagai berikut:

No	Kriterian	Prosentase
1	Sangat efektif	>100%
2	Efektif	100%
3	Cukup efektif	90% – 99%
4	Kurang efektif	75% – 89%
5	Tidak efektif	<75%

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah/ kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah (mahmudi, 2010:142) rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Pedoman menurut Halim (2002 : 189) dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:

No	Kriterian	Prosentase
1	Rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif	0% - 25%
2	Rendah dengan pola hubungan Konsultatif	26% - 50%
3	Sedang dengan pola hubungan Partisipatif	51% – 75%
4	Tinggi dengan pola hubungan Delegatif	76% – 100%

Berikut ini pola hubungan menurut Hersey dan Blanchard dalam Halim (2002:188) yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah:

1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

6. Analisis Varians Belanja Daerah. Menurut Mahmudi (2010: 157) apabila belanja daerah melampaui

batas maksimum (anggaran) maka kinerjanya dinilai kurang baik. Dapat dirumuskan sebagai berikut :

Varians belanja = anggaran belanja – realisasi belanja

7. Analisis Keserasian Belanja Daerah. Analisis keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal (Mahmudi, 2010:162). Analisis keserasian belanja daerah antara lain berupa:
   1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio BO terhadap TB} = \frac{\text{RealisasiBelanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

   2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio BM terhadap TB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

   Menurut Mahsun, 2006 dalam Batafor (2011) nilai keserasian belanja daerah dikategorikan berikut:

No	Keserasian	Prosentase
1	Tidak Serasi	0% – 20%
2	Kurang Serasi	> 20% – 40%
3	Cukup Serasi	> 40% – 60%
4	Serasi	> 60% – 80%
5	Sangat Serasi	> 80% – 100%

8. Analisis Efisiensi Belanja Daerah. Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran Mahmudi (2010:166). Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi BD} = \frac{\text{Realisasi BD}}{\text{Anggaran BD}} \times 100\%$$

9. Menganalisis hasil masing – masing rasio dibandingkan dengan menurut kriteria.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Analisis

Tabel 2
Pembahasan

No	Analisis kinerja keuangan	Hasil rata-rata
1	Analisis varians pendapatan	21.172.482.197,64
2	Derajat desentralisasi	12,17%
3	Rasio ketergantungan keuangan daerah	53,20%
4	Rasio efektivitas PAD	119,56%
5	Rasio kemandirian keuangan daerah	23,04%
6	Analisis varians belanja daerah	466.348.701.360,28

No	Analisis kinerja keuangan	Hasil rata-rata
7	Analisis keserasian belanja daerah:	
	a.Rasio BO terhadap TB	79,09%
	b. rasio BM terhadap TB	20,80%
8	Rasio efisiensi belanja daerah	82,40%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kediri (di olah 2018)

B. Pembahasan

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis varian pendapatan dikatakan memiliki kinerja pengelolaan keuangan pendapatan yang baik jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan), sedangkan kinerja keuangan pendapatan dinilai kurang baik jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) (Mahmudi, 2015). Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatannya yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Analisis varians secara umum menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pendapatan daerah Kabupaten Kediri dapat dikatakan baik ditunjukkan dengan sebagian besar tahun yang diteliti masih mengalami selisih lebih, meskipun terjadi fluktuatif. Dari data hasil penelitian Kabupaten Kediri memiliki kategori fluktuasi, hal ini berarti bahwa kinerja pajak di Kabupaten Kediri dan Badan usaha milik Daerah menyumbangkan pendapatan yang belum optimal bagi Kabupaten Kediri.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Gozaliem dkk, 2013), Mengatakan bahwa analisis varians pendapatan terlaksana dengan baik karena realisasi meningkat setiap tahunnya melebihi yang dianggarkan pada Pemerintah Kota Bitung.

2. Derajat Desentralisasi

Kategori derajat desentralisasi menurut dalam Bisma dan Susanto (2010), menyebutkan jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Menurut hasil perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Kediri menunjukkan angka rata-rata 12,17%sehingga dapat dikatakan rendah/ kurang. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 19,64%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada

pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengelola PAD, namun dana dari pemerintah pusat juga masih ikut meningkat menyebabkan derajat desentralisasi menjadi kurang, sedangkan derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 13,56%. Penurunan disebabkan Rendahnya kontribusi PAD dikarenakan masih bergantungnya pemerintah Kabupaten Kediri terhadap pemerintah pusat. Semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan desentralisasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Kediri belum maksimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah baik pendapatan dari sektor pajak maupun pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Paramitha dkk, 2012), menyatakan bahwa rasio derajat desantralisasi masih kurang meskipun ada peningkatan tapi nilainya masih kurang.

3. **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma dan Susanto (2010) nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerahjika Rasio ketergantungan keuangan daerah berada di atas 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang tinggi. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Kediri menunjukkan angka rata-rata sebesar 53,20%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 68,78%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 58,05%. Hasil analisis masing - masing angka di atas 50% menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri masih sangatbergantung terhadap pemerintah pusat, semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Kediri terhadap pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Kediri belum maksimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah baik pendapatan dari sektor pajak maupun pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Paramitha dkk, 2012), menyatakan bahwa rasio ketergantungan masih sangat tinggi dikarenakan Pemerintah Kota Kota mabagu masih cenderung mengandalkan dana dari pemerintah pusat

4. **Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Kriteria Efektifitas PAD menurut Mahmudi (2015: 143), jika rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berada pada 100% berarti pemerintah daerah mampu mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang diharapkan. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri menunjukkan angka rata – rata sebesar 119,56%. Tingkat Efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 130,63%, sedangkan tingkat Efektifitas terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 106,56%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri sangat efektif terbukti pada beberapa tahun tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah diatas 100%.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Gozaliem dkk,2013), menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bitung dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dapat dikatakan sangat efektif, hal ini terlihat dalam rasio efektivitas PAD dan dalam analisis varians juga dapat terlihat bahwa pemerintah daerah sangat efektif dalam menggunakan anggaran pendapatan daerah.

5. **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2002:189), dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah menyebutkan jika rasio Kemandirian berada di bawah 25% berarti pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian yang rendah sekali. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kediri menunjukkan angka rata – rata sebesar 23,04%. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 31,72%, sedangkan tingkat Kemandirian terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 16,70%. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang rendah menurut Halim (2002:189), termasuk dalam

kategori pola Instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Hal ini terbukti dengan banyak program yang bersumber dari pemerintah pusat seperti program dana desa dll.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Yunus dkk, 2017), menyatakan bahwa Kabupaten Morowali memiliki kinerja kurang baik dikarenakan masih dinilai sangat rendah dengan pola hubungan instruktif.

6. Analisis Varians Belanja Daerah

Jika Analisis Varians Belanja Daerah terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja keuangan Belanja dinilai baik (Mahmudi, 2010). Analisis Varians Belanja Daerah menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan belanja Kabupaten Kediri dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semua Realisasi Belanja tidak melebihi Anggaran Belanja. Realisasi Anggaran Belanja dari tahun 2013-2017 yang mencapai angka rata-ratasebesar Rp 466.348.701.360,28. Varians Belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 586.820.141.653,67 hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten kediri dalam membuat anggaran belanja untuk belanja tidak terduga terlalu tinggi dikarenakan pada tahun 2016 masih ada proyek pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2015.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Karlina dkk, 2017), yang menyatakan bahwa analisis varians belanja daerah Kota Surabaya rata – rata baik.

7. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Menurut Mahsun dalam Batafor (2011), nilai Keserasian Belanja Daerah jika dilihat dari tingkat rasio Belanja Operasi terhadap Total Realisasi Belanja Daerahmenunjukkan rata – rata diatas 60% berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri lebih mengalokasikan Belanja Operasi atau melakukan keperluan belanja

yang bersifat jangka pendek. Sedangkan jika berdasarkan tingkat Rasio Belanja Modal terhadap Total Realisasi Belanja Daerah menunjukkan rata – rata dibawah 40% berarti Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengalokasikam Belanja Modal atau melakukan belanja yang bersifat jangka panjang cukup rendah. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan belanja yang relatif besar dengan rata-rata sebesar 79% yang digunakan untuk keperluan belanja operasi, sedangkan untuk belanja modal hanya sebesar 21% hal ini disebabkan karena pemerintah lebih mengutamakan belanja operasi guna meningkatkan pelayanan daripada untuk investasi jangka panjang.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Yunus dkk, 2017), menyatakan bahwa rasio keserasian belanja operasi dinilai serasi sedangkan belanja modal dinilai kurang serasi, dimana Kabupaten Morowali lebih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja operasi di bandingkan dengan belanja modal.

8. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010). Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Kediri menunjukkan nilai rata – rata sebesar 82,4%. Tingkat efisiensi belanja Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 76,11%, sedangkan tingkat Efisiensi Belanja Daerah terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 88,79%. Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Kediri digolongkan cukup Efisien hal ini terbukti pada semua tahun berada di bawah 100%.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Yunus dkk, 2017), menyatakan bahwa Analisis efesiensi Kabupaten Morowali dinilai sudah efisian, karena cenderung berfluktuasi disebabkan karena sebagian besar belanja daerah digunakan sebagai belanja operasi. Dan juga sesuai dengan ungkapan yang dijelaskan oleh

(Faisol, 2017) yang menerangkan bahwa efisiensi anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam merealisasikan desentralisasi secara nasional, hal tersebut dikarenakan sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang dilihat tingkat pertumbuhannya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Analisis Varians Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kediri secara umum sudah dapat dikatakan baik karena realisasi pendapatan melampaui target anggaran.
2. Analisis Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Kediri dapat dikatakan kurang, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum bisa menyelenggarakan desentralisasi.
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri dikatakan masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.
4. Efektifitas PAD Daerah Kabupaten Kediri dapat dikatakan sangat efektif sekali karena pemerintah daerah dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah sesuai target yang diharapkan.
5. Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Kediri dikatakan rendah karena tingkat ketergantung terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi yang menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah.
6. Analisis Varians Belanja daerah Kabupaten Kediri secara umum sudah dapat dikatakan baik karena anggaran pendapatan lebih besar daripada realisasi pendapatan.
7. Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Kediri secara umum dapat dikatakan kurang serasi karena kabupaten lebih mengutamakan belanja operasi dibandingkan belanja modal.
8. Analisis Efisiensi Belanja daerah Kabupaten Kediri dapat dikatakan Efisien.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri
   a. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu lebih berusaha untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah.
   b. Pemerintah Kabupaten Kediri untuk dapat meningkatkan kinerjanya hendaknya mengurangi ketergantungan pada Pemerintah Pusat. emerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya ke Kabupaten Kediri seperti memberikan keamanan dalam berinvestasi, bunga yang tinggi, dan lain sebagainya. Dengan meningkatkan investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat, PAD juga dapat meningkat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar analisis terhadap kinerja pemerintah daerah mendapatkan gambaran kinerja pemerintah yang jelas dan lebih mendekati kebenaran. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan seperti rasio pertumbuhan, pembiayaan, dan rasio-rasio lainnya dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah agar lebih optimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Bisma, I Dewa. Hery, Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara Edisi Khusus*, 3 (4) : 75-86.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2018, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013-2017. Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

Faisol. 2017. *The Analysis of local Government Expenditure Efficiency and Its Impact on Economic Growth in*

Indonesia. The 3rd International Conference on Economics, Business and Accounting Studies ICEBAST 2017 – Faculty of Economics and Business – University of Jember.

Gozaliem dkk. (2013) Analisis pendapatanm dan belanja pada pemerintahan kota Bitung tahun 2008 – 2013. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.

Karlina, anis. Nur, handayani 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015.* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. 3 (6); 2460-0585.

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Media gramini, Muh. Yunus kasim dan Ci rianty k. Bidin. (2015). analisis kinerja anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten morowali. jurnal ilmu manajemen universitas tadulako.1 (3); 055-069

Nurlan Darise. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Indeks.

Paramita, dkk. 2014. Analisis Kinerja KeuanganPemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA. 2 (2); 1521-1527.

Sugiyono. (2015) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta CV, Bandung.